



LAPORAN KINERJA

2023

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKj Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2023 masih tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus dilakukan.

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2024

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

YAMOWA, L. S.H. HAREFA
NIP.19750130 199402 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
Persentase penurunan gangguan trantibum, Formulasi Perhitungan :
$$(n) - (n-1) / (n-1) \times 100\% * n = \text{jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.}$$

Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar -4.5% sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 4,57 %. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 101,5 %.
 - Tidak tercapainya target ini dikarenakan belum disusunnya dokumen Peta rawan kententraman dan ketentertiban Umum serta perubahan formulasi perhitungan pada indikator renstra 2023-2026
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 163,8% terjadi penurunan sebesar 62,3%. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 163,8 % terjadi peningkatan sebesar 62,3%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan”.
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
Persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran, Formulasi Perhitungan :
$$(\text{Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran}) + (\text{Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran}) / 2 \times 100\%$$

Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Tidak tercapainya target ini dikarenakan belum disusunnya dokumen Peta rawan Kebakaran dan sarana serta prasarana yang belum sesuai dengan Standar pelayanan minimal serta perubahan formulasi perhitungan pada indikator renstra 2023-2026
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 64 %; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 54,5 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 85,15 %.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 191% terjadi penurunan sebesar 105

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP”.
Capaian strategis 3 tidak dilaksanakan lagi karena terjadi perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233) sehingga penilaian Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan lagi pada Satuan Polisi Pamong Praja hanya dilaksanakan pada beberapa OPD tertentu saja, sesuai dengan Permenpan yang dimaksud.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi PD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Lambatnya Hasil evaluasi Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sehingga penetapan DPPA diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2023
2. Keterbatasan cakupan Jumlah personil SatpolPP yang cakap dan pandai untuk mengelola administrasi keuangan.
3. Belum optimalnya Budaya kerja pada lingkungan SatpolPP yang BERAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)
4. Kurangnya solidnya koordinasi dan integrasi antara Satpol PP dengan PPNS pada OPD lain sehingga masih ada ego sektoral dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
5. Sulitnya Koordinasi dengan bidang terkait capaian realisasi fisik dan keuangan sehingga Pelaporan Program, kegiatan serta sub kegiatan pada SATPOLPP belum didukung dengan data dan bukti dukung yang valid.
6. Sarana dan Prasarana Tibum dan Damkar yang belum sesuai dengan standar pelayanan minimal

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi



	Hal
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR LAMPIRAN	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	7
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	9
1.3 Isu-isu Strategis	10
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	18
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.3 Struktur Program dan kegiatan Tahun 2023	20
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	24
3.2. Efisiensi Anggaran	40
3.3. Inovasi	41
3.4. Penghargaan	41
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	44

Daftar Tabel



		Hal
Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	12
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	15
Tabel I.3	Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023	16
Tabel I.4	Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023	17
Tabel II.1	Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	19
Tabel II.3	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	20
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023	21
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	22
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2023	25
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	26
Tabel III.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 (<i>landscape</i>)	26
Tabel III.5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	27
Tabel III.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023	40

Daftar Gambar

	Hal
Gambar I.1. Cascading Kinerja	8
Gambar I.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9
Gambar III.1 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023	31

Daftar Lampiran

	Hal
Lampiran 1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	45
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2023	46
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	48
Lampiran 4 Evaluasi LKJ Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	49
Lampiran 5 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	50
Lampiran 6 SK IKU Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	51
Lampiran 7 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis Dan Struktur Organisasi	53
Lampiran 8 Peta Proses Bisnis	59
Lampiran 9 Struktur Organisasi	64

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

Cascading Kinerja Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan Isu-Isu Strategis Dukungan SDM, Sarana- Prasarana dan Anggaran Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung- jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

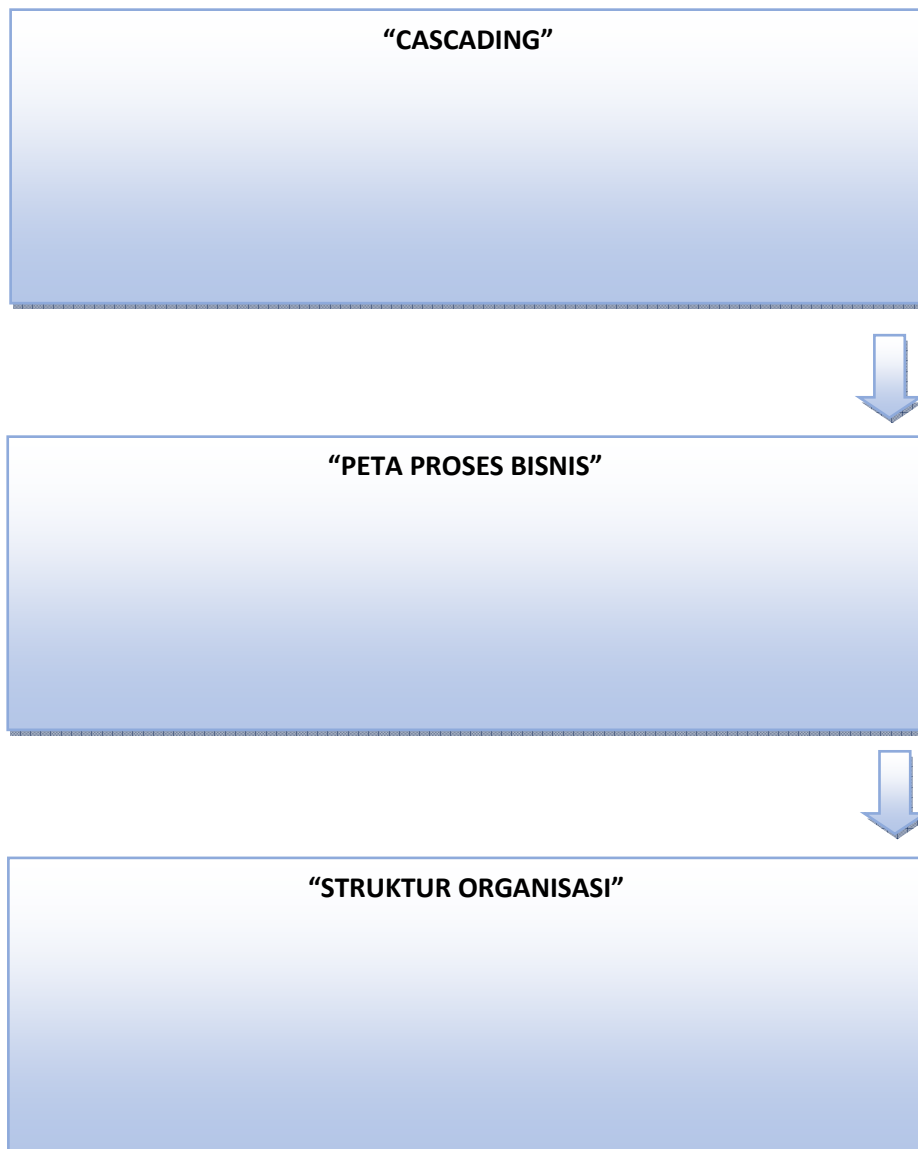
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
 - b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan berupa dokumen Rencana strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
(halaman ini terdapat di lampiran)



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Adapun Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satpol PP dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kewenangan provinsi;
- b. Penyelenggaraan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



PETA JABATAN

(pdf Peta Jabatan)

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.”,, antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat Provinsi kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya merasakan tentram, tertib, teratur dan aman serta terlindungi dalam menjalankan kegiatannya. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang, Tahun 2019 sebanyak 975 orang/pelanggar; Tahun 2020 sejumlah 941, Tahun 2021, sejumlah 1737, Tahun 2022 sejumlah 1485 serta tahun 2023 sejumlah 1404.
2. Kondisi kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan keamanan juga dapat digambarkan dengan angka jumlah kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun *trendnya* menurun, terjadi tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kasus tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus, Tahun 2020 sejumlah 1320, Tahun 2021, sejumlah 1127, Tahun 2022 sejumlah 1321 serta tahun 2023 sejumlah 1125 Sama halnya masih terdapat kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga mengakibatkan maraknya peredaran narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Belum semua Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka , serta membantu penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2023 jumlah anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 711 orang, namun baru 1896 orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan;
4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang sering mengalami bencana kebakaran, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang yang sering mengalami bencana kebakaran. Sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus kebakaran, Tahun 2020 terjadi 403 kasus kebakaran, Tahun 2021 terjadi sebanyak 227 kasus pada Tahun 2022 terjadi sebanyak 225 , Tahun 2023 terjadi sejumlah 1955 kali kasus kebakaran dan hanya 1086 kejadian yang bisa dikategorikan sebagai kebakaran yang dilayani dalam waktu tanggap 15 menit (respon time), hal tersebut disebabkan karena sarana dan prasarana yang yang tidan mendukung Standar Pelayanan Minimal

sehingga sampai Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, kecuali anggota Satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran belum diberikan pemahaman metode pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI /PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JML	KUALIFIKASI				JML	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A	JABATAN STRUKUTRAL												
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
2.	Sekretaris	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
3.	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
4.	Kabid Penegakan Perda dan Perkada	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
5.	Kabid Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Personil	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
6.	Kabid Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamata Non Kebakaran	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
7.	Kasubbag Umum	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
8.	Kasubbag Keuangan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
9.	Kasubbag Perencanaan	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
10.	Kasi Penertiban, Operasi dan Pengendalian	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
11.	Kasi Deteksi Dini	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
12.	Kasi Pemeriksaan dan Penyidikan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
13.	Kasi Pengawasan, Penyuluhan, dan Hubungan Antar Lembaga	1	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-
14.	Kasi Peningkatan Kapasitas Personil	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
15.	Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
16.	Kasi Pemetaan Standarisasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Pertolongan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
17.	Kasi Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Serta Kerjasama antar Daerah Berbatasan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
B	JABATAN FUNGSIONAL												

NO	JABATAN	FORMASI /PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JML	KUALIFIKASI				JML	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1.	Polisi Pamong Praja Madya	2	-	2	-	-	2	1	1	-	-	2	-
2.	Polisi Pamong Praja Muda	22	-	22	-	-	22	-	22	-	-	22	-
3.	Pranata Humas Muda	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
4.	Pejabat Barang Jasa Muda	1	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-
5.	Polisi Pamong Praja Pertama	25	-	25	-	-	2	-	2	-	-	2	-
6.	Analisis Kepegawaian Pertama	1	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-
7.	Pranata Komputer Pertama	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-
8.	Analisis Kebakaran Pertama	2	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-
9.	Polisi Pamong Praja Penyelia	12	-	-	12	-	0	-	-	-	-	-	-
10.	Arsiparis Penyelia	1	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-
11.	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	12	-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-
12.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-
13.	Polisi Pamong Praja Pelaksana	12	-	-	-	12	10	-	-	-	10	9	1
14.	Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	115	-	-	-	115	0	-	-	-	-	-	-
15.	Pemadam Kebakaran Pelaksana Pemula	20	-	-	-	20	0	-	-	-	-	-	-
C	JABATAN PELAKSANA												
1.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-
2.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	2	-	-	2	-	0	-	-	-	-	-	-
3.	Pengadministrasi Umum	3	-	-	-	3	1	-	-	-	1	1	-
4.	Penata Laporan Keuangan	2	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-
5.	Bendahara	1	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-
6.	Pengadministrasi Keuangan	2	-	-	-	2	0	-	-	-	-	-	-

NO	JABATAN	FORMASI /PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JML	KUALIFIKASI				JML	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
7.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
8.	Pengelola Program dan Kegiatan	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
9.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	2	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-
10.	Pengendali Teknis Kemanan	1	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-
11.	Pengelola Data Keamanan dan Ketrtiban	1	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-
12.	Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	2	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-
13.	Komandan Petugas Keamanan	4	-	-	-	4	0	-	-	-	-	-	-
14.	Analisis Keamanan	2	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-
15.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-
16.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
17.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
18.	Pengadministrasi Umum	1	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-
19.	Penata Laporan Keuangan	2	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-
20.	Bendahara	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1
21.	Pengadministrasi Keuangan	2	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2	-
22.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-
D	PPPK/PHL												
1.	Teknis Bantuan Polisi Pamong Praja	132	-	-	-	132	113	-	24	3	86	95	18
2.	Teknis Lainnya Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20	-	-	-	20	19	-	3	1	15	14	5
3.	Pengemudi	9	-	-	-	9	8	-	1	1	6	8	-
4.	Pramu Kebersihan	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	2	1

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 87 orang (40,09%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang (0,45%), D3 sebanyak 23 orang (10,59%), SLTA sebanyak 32 orang (14,74%), SLTP sebanyak 0 orang (0%), dan SD sebanyak 0 orang (0%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lebih banyak dilakukan oleh laki-laki

Tabel I.2
Sarana-Prasarana

NO.	KLASIFIKASI	JUMLAH BARANG	NILAI ASET*
1	Tanah		
	Tanah	1	
2	Peralatan dan mesin		
	alat besar	3	
	alat angkutan	33	
	alat bengkel dan alat ukur	3	
	alat pertanian		
	alat kantor dan rumah tangga	698	
	alat studio, komunikasi dan pemancar	63	
	alat kedokteran dan kesehatan		
	alat laboratorium	2	
	alat persenjataan	356	
	Komputer	93	
	alat eksplorasi		
	alat pengeboran		
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian		
	alat bantu eksplorasi		
	alat keselamatan kerja	19	
	alat peraga		
	peralatan proses/produksi		
	rambu – rambu		
	peralatan olah raga		
3	Gedung dan bangunan		
	bangunan gedung	5	
	monumen		
	bangunan menara		
	tugu titik kontrol/pasti		
4	Jalan, irigasi dan jaringan		
	jalan dan jembatan		
	bangunan air		
	instalasi		

NO.	KLASIFIKASI	JUMLAH BARANG	NILAI ASET*
	jaringan		
5	Aset tetap lainnya		
	bahan perpustakaan		
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga		
	hewan		
	biota perairan		
	tanaman		
	barang koleksi non budaya		
	aset tetap dalam renovasi		
6	Konstruksi dalam pengerjaan		
	konstruksi dalam pengerjaan	1	
7	dll.		
Total			

Kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 1 unit kendaraan operasional, 9 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati : Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Hanya saja sebanyak % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung*) tuntutan pekerjaan yang 85 % berbasis IT.

Tabel I.3
Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2022	21.989.057.158	944.198.538	-	-	22.933.255.696
2023	23.362.119.124	1.384.345.740			24.746.464.864

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 dibanding tahun 2022 terdapat kenaikan Total anggaran belanja sebesar Rp 24.746.464.864 Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel I.4
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/156/ITDA/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022:</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk meningkatkan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengefektifkan pengendalian kinerja 2. Perlu adanya peningkatan dan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dalam setiap kegiatan pemantauan yang dilakukan 3. hasil evaluasi rencana aksi seharusnya menunjukkan perbaikan pada setiap periode 4. Hasil evaluasi program pemantauan sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang 5. hasil evaluasi rencana aksi hendaknya ditindaklanjuti sepenuhnya dalam bentuk langkah - langkah nyata 	<p>Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2023 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemantauan terhadap capaian program dan target kinerja pada bidang – bidang 2. mengevaluasi rencana aksi dengan memperhatikan indikator capaian pada setiap bidang 3. menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi pada setiap periode 4. menyusun langkah - langkah yang tepat dalam menyusun rencana aksi dalam melaksanakan program untuk perbaikan dimasa yang akan datang 5. memantau rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD Strategi dan Arah Kebijakan Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya **Meningkatkan aspek kebebasan dalam demokrasi** Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
2. Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah (Satpol PP)

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1
Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2023-2026
(tabel ini dapat di buat landscape)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menurunnya gangguan ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persentase	-4,50	-4,50	-5,00	-5,50	-6,00	-6,00	
2.	Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan	persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase	5.10	5.10	5.00	4.90	4.80	4.80	
3.	Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) SATPOLPP	Nilai reformasi Birokrasi	Nilai		Tidak dilaksanakan lagi karena terjadi perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233) sehingga penilaian Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan lagi pada Satuan Polisi Pamong Praja hanya dilaksanakan pada beberapa OPD tertentu saja, sesuai dengan Permenpan yang dimaksud.					

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2
Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Menurunnya gangguan ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Penindakan gangguan trantibum - Pelatihan dan penguatan anggota Satlinmas se Provinsi Kep. Babel - Peningkatan kompetensi personil satpol pp dibuktikan dengan sertifikasi sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat - Pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat - Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP - Penegakan perda dan perkada Provinsi Kep.

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		dengan jabatannya - Peningkatan penengakan perda/perkada yang mengandung sanksi	Bangka Belitung
2.	Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan	Peningkatan respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Penyelenggaraan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran
3.	Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) SATPOLPP	Peningkatan akuntabilitas perencanaan dan pengelolaan keuangan serta kinerja pemerintahan perangkat daerah	- Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah - Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3
Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023
(sesuai dokumen PK)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
1. Menurunnya gangguan ketertiban Umum	1.1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.882.975.064	8.262.305.364	(-) 620.669.700
	1.1.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.170.374.640	7.913.305.364	(-) 257.069.276
	1.1.2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	84.000.000	109.000.000	(+) 25.000.000
	1.1.3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	95.000.000	240.000.000	(+)145.000.000
2. Meningkatkan respon cepat penanggulanga n kejadian kebakaran/per tolongan	1.2. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.305.992.204	1.505.624.916	(+)199.632.712
	1.2.1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.255.992.616	1.430.624.916	(+) 174.632.300
	1.2.3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, PEnanggulangan Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	49.999.588	74.999.588	(+)25.000.000
3. Meningkatkan nilai Reformasi	1.3. Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.840.330.996	14.978.534.996	(-) 137.544.000

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
Birokrasi (RB) SATPOLPP	1.3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.189.400	277.194.100	(+)95.004.700
	1.3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.445.347.168	11.607.973.068	(+) 162.625.900
	1.3.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	3.500.000	0	0
	1.3.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	646.936.840	680.436.840	(+)33.500.000
	1.3.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.745.400	359.629.600	(+) 119.884.200
	1.3.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.183.544.000	740.071.200	(-)443.472.800
	1.3.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	636.099.388	656.005.388	(+)19.906.000
	1.3.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.968.800	657.224.800	(+) 154.256.000
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		25.029.298.264	24.746.464.864	(-) 282.833.400

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	-4,50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	-1% -1% -1% -1,5 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
2.	Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	%	5.10	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1% 1% 1% 2,10
3.	Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP	Nilai reformasi birokrasi unit Satpol PP	Nilai	0		

Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 melaksanakan revaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Revaluasi dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	%	-4,50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	-1% -1% -1% -1,5 %
2.	Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan	persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	%	5.10	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1% 1% 1% 2,10
3.	Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP	Nilai reformasi birokrasi unit Satpol PP	nilai	0		

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran berkurang 24.746.464.864 % sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk pembiayaan
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga, yaitu:
 - 3.1. BTT dalam rangka : Rp.
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu:
 - 4.1. Program

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

Capaian Kinerja Tahun 2023
dan Realisasi Anggaran
Inovasi Lintas Sektor

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2
Capaian Kinerja Tahun 2023
(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Sasaran strategis	Indikator/meta indikator	Satuan	Baseline 2022	Capaian 2022	Tahun 2023				Target akhir Renstra
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<u>Indikator:</u> Persentase penurunan gangguan trantibum <u>Formula Perhitungan:</u> $(n) - (n-1) / (n-1) \times 100\% \quad * n = \text{jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kep. Babel}$	%	41,43	41,43	-4,50	4,57	101		-6,00
2	Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan	<u>Indikator:</u> persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran <u>Formula Perhitungan:</u> $(\text{Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran}) + (\text{Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran}) / 2 \times 100\%$	%	52,11	52,11	5,10	54,5	1068		4.80
3	Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP	<u>Indikator:</u> Nilai reformasi birokrasi unit Satpol PP <u>Formula Perhitungan:</u> Nilai pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Satpol PP oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak dilaksanakan lagi karena terjadi perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233) sehingga penilaian Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan lagi pada Satuan Polisi Pamong Praja hanya dilaksanakan pada beberapa OPD tertentu saja, sesuai dengan Permenpan yang dimaksud.							

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Kinerja sasaran Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diukur dengan indikator Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3.
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	$(n) - (n-1) / (n-1) \times 100\%$ * n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kep. Babel

Kinerja sasaran Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan $(n) - (n-1) / (n-1) \times 100\%$ * n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kep. Babel. Kinerja sasaran ini adalah 4,57 % atau sebesar 101 % dari target -4,50 %. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022/ baseline	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	.41,43	-4,50	4,57	101	-6.00	-76,16

Analisis Ketercapaian Sasaran menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 4,57 % , dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101 % (terlampai).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 41,43 (kolom 3), terhadap target tahun lalu sebesar 25,30 (data Lkj Tahun lalu) terdapat penurunan $(4,57\% - 41,43) = - 26,86$. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan sasaran Program yaitu Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Indikator Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat formula perhitungan indikator ini adalah $(n) - (n-1) / (n-1) \times 100\%$ * n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se-Provinsi Kep. Babel. Pada tahun 2023 diselenggarakan 1404 Dokumen kasus.

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(1404) - (1404-1) / 1404-1 \times 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target -4,50 % atau sebesar 100%.

Capaian ini didukung oleh Data Sektoral SatpolPP Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota, data angka kriminalitas dari POLDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kemudian dihitung rerata validitas setiap parameter tersebut dalam persen.

Tabel III.5.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat $(n) - (n-1) / (n-1) \times 100\%$, * n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kep. Babel = adalah $((1404) - (1404-1) / 1404-1) \times 100\%$	-4,50%	4,57%	101 %

3.1.2 Sasaran : Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan

Kinerja sasaran Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan diukur dengan indikator Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.2.2.1
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	$(\text{Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran}) + (\text{Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran}) / 2 \times 100\%$

Kinerja sasaran Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan diukur dengan sasaran program Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan menggunakan formulasi $(\text{Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran}) + (\text{Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran}) / 2 \times 100\%$

capaian kinerja sasaran ini adalah 55,66% atau sebesar -11,45% dari target 64 %. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.2.2.2.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
(tabel ini dapat di buat landscape)

No	IndikatorSasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	67,11%	5,10%	54,5%	1068 %	4,80%	1135%

Analisis Ketercapaian Sasaran Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 54,5 % dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 5,10 % (tidak terlampaui)*
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 67,11 % (kolom 3), terhadap target tahun lalu sebesar 35 % (data Lkj Tahun lalu) terdapat penurunan sebesar -12,61 %*
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.*

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran yaitu meningkatnya Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan dengan sasaran program Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan mempunyai Indikator Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan, formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran) + (Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran) / 2 x 100%.
2. Capaian indikator kinerja adalah $((4+2 + (30)/2 \times 100\%)=54,5$.
(contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 64%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 61,60 % (capaian tahun lalu). Target Tahun 2023 tidak tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti Sarana dan Prasana yang tidak memenuhi SPM, kurangnya Diklat pada Pegawai Pemdam Kebakaran. Targetdiproyeksikan akan tercapai melalui pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024.


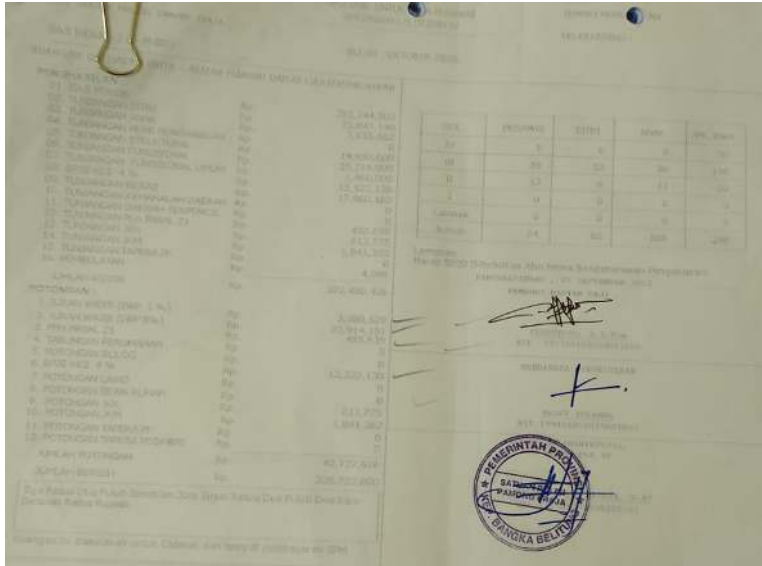
Tabel III.5.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	(Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran) + (Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran) / 2 x 100% $((4+2 + (30)/2 \times 100\%)=54,5$.	64%	54,5%	85,15 %

3.1.3 Sasaran Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP

Kinerja sasaran Kinerja sasaran Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP diukur dengan indikator Nilai reformasi birokrasi unit Satpol PP. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator tidak dilaksanakan lagi karena terjadi perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233) sehingga penilaian Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan lagi pada Satuan Polisi Pamong Praja hanya dilaksanakan pada beberapa OPD tertentu saja, sesuai dengan Permenpan yang dimaksud.

Gambar III.I
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
2.		Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
3.		<p>Kegiatan Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah</p>

DOKUMENTASI BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR – ALAT LISTRIK
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH DENGAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN KOMPONEN LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR



**Kegiatan Administrasi
umum**



DOKUMENTASI HASIL PEKERJAAN
BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA
(MESIN POTONG RUMPUT DAN CCTV)

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kode Rekening : 1.05.01.1.07.06.5.2.02.05.01.0005







Diserahkan oleh

PIHAK PERTAMA

CV. RUMPUH PRATAMA,



RYKY NOPRIYANTO,

DIREKTUR

Diterima oleh :

PIHAK KEDUA

PENGGUNA ANGGARAN SELAKU

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK,

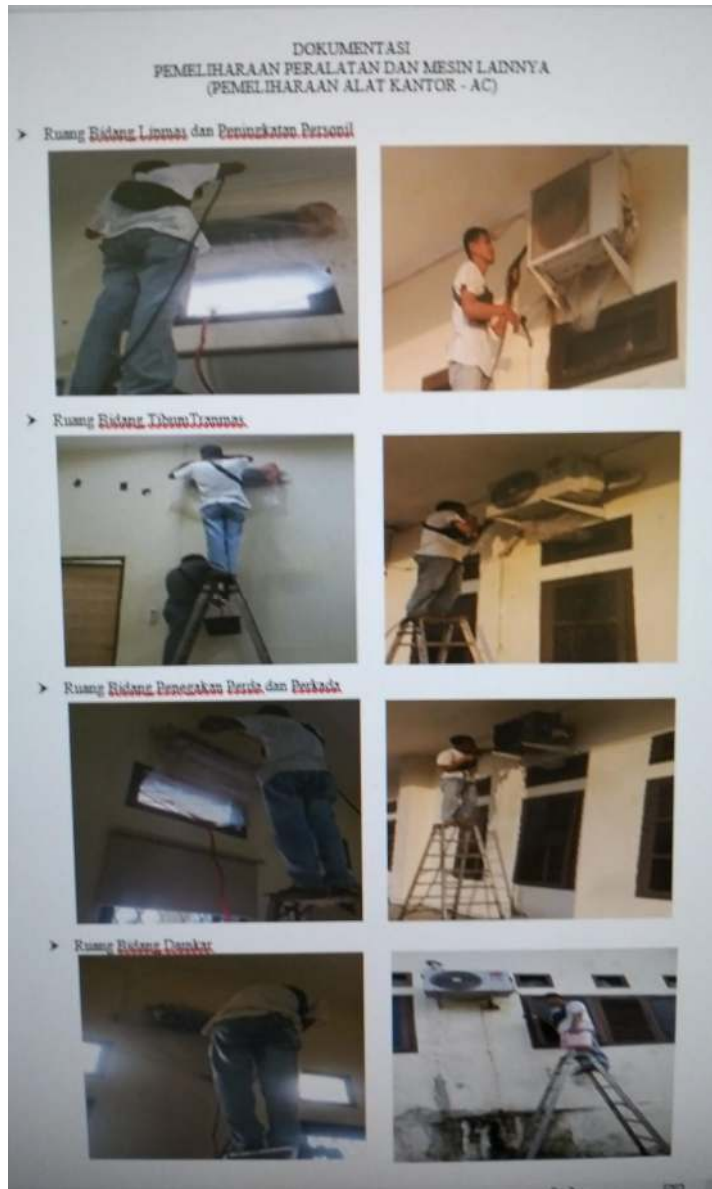


YANDAWA HAREFA

NIP. 19750130 199402 1 003

Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
prnunjang urusan
pemerintah daerah

6.



**Kegiatan
Pemeliharaan Barang
milik daerah
penunjang urusan
Pemerintahan
daerah**



Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.

TERIMA BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM SPESIFIKASI : JASA TENAGA PELAYANAN UMUM & PRAMUBAKTI KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG UNTUK BULAN JANUARI 2024											
NO	NAMA / NIP	GOL	JABATAN / TUGAS	PERHITUNGAN			PPH. PSL 21				TANDA TANGAN
				Gaji Sopir	Volume/ Bulan	Jumlah Kotor	GOL. IV	GOL. III	JUMLAH PPH		
1	2	3	4	5	6	7-526	8	9	10-8-9	11-7-10	12
1	SHIDIQ SANTOSO NIPTK. 31781225041959	-	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 2.900.000	1	Rp 2.900.000	-	-	-	Rp 2.900.000	Ed
2	ROMADANI NIPTK. 31940227021522	-	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 2.900.000	1	Rp 2.900.000	-	-	-	Rp 2.900.000	Red
3	DENI STIAWAN NIPTK. 31761214021503	-	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 2.900.000	1	Rp 2.900.000	-	-	-	Rp 2.900.000	Dj
4	ACEP RIADI NIPTK. 31760312021506	-	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 2.900.000	1	Rp 2.900.000	-	-	-	Rp 2.900.000	Aap
5	FIRMANSYAH NIPTK. 31880615031556	-	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 2.900.000	1	Rp 2.900.000	-	-	-	Rp 2.900.000	Fang
6	EFAR HARYANDHA NIPTK. 31820928031528	-	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 2.900.000	1	Rp 2.900.000	-	-	-	Rp 2.900.000	Eg
7	SALEH NIPTK. 31821216031805	-	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 2.900.000	1	Rp 2.900.000	-	-	-	Rp 2.900.000	Suf
8	MUCHRIS NIPTK. 31680324010951	-	PRAMUBAKTI	Rp 2.900.000	1	Rp 2.900.000	-	-	-	Rp 2.900.000	Mu
9	AHMAD EFFENDY NIPTK. 31920520052040	-	PRAMUBAKTI	Rp 2.900.000	1	Rp 2.900.000	-	-	-	Rp 2.900.000	A

8.		<p>Kegiatan Penanganan Gangguan ketetraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p>
9		<p>Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</p>

<p>10.</p>		<p>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</p>
<p>11.</p>		<p>Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</p>

12.		<p>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</p>
-----	--	---

Faktor Pendukung keberhasilan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Koordinasi dan monitoring dari Kementerian dalam Negeri terhadap pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal
- Dukungan anggaran yang cukup baik terhadap Standar Pelayanan Minimal melalui APBD Tahun Anggaran 2022

Faktor Penghambat keberhasilan

- Lambatnya Hasil evaluasi Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait APBD Perubahan Tahun anggaran 2023 sehingga penetapan DPPA diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2023
- Lambatnya penerbitan DPPA APBD Perubahan 2023 menyebabkan lambatnya proses pelaksanaan kegiatan
- Sarana dan prasarana yang belum mencukupi kebutuhan standar pelayanan minimal sehingga pelayanan ke masyarakat kurang optimal.

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	4,5	4,57 $(1404)-(1404-1)/1404-1)*100\%$	101,5%	8.262.305.364	7.847.633.870	90,51	414.671.494
2.	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	5,10	54,5 $(4+2 + (30)/2 \times 100\%$	1068%	1.505.624.504	1.401.300.494	93,07	104.324.010
3.	Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP	Tidak dilaksanakan lagi karena terjadi perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233) sehingga penilaian Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan lagi pada Satuan Polisi Pamong Praja hanya dilaksanakan pada beberapa OPD tertentu saja, sesuai dengan Permenpan yang dimaksud.				14.978.534.966	13.117.904.958	87,57	1.860.630.038
Total Belanja						24.746.464.864	22.816.340.643	93%	1.930.124.221

Sumber: *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2023, Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023*

berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2023 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp **24.746.464.864** terealisasi **22.816.340.643** atau 93% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp **1.930.124.221** yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi sewa tempat
- Efisiensi biaya makanan dan minuman
- Efisiensi belanja modal

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/ permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi URC (unit Reaksi Cepat) untuk Pelaporan tim Pelayanan terpadu reaksi cepat

3.4 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengamanan aset, Pengawasan dan Patroli sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya
2. Melaksanakan Penegakkan Perda dan Perkada secara Optimal
3. Melaksanakan fungsi Pemadam kebakaran respotime 15 menit

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

*Kesimpulan
Rekomendasi
Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Lambatnya Hasil evaluasi Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait APBD Perubahan Tahun anggaran 2023 sehingga penetapan DPPA diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2023
2. Lambatnya penerbitan DPPA APBD Perubahan 2023 menyebabkan lambatnya proses pelaksanaan kegiatan
3. Pada tahun 2023, mbil cukup dalam kondisi baik hanya anggaran tetap harus disediakan dengan jumlah mobil operasional pada dinas, kemudian ada salah satu mobil Dan Motor biaya perbaikannya melebihi Pergub dari standar harga satuan pemeliharaan kendaraan Dinas sehingga tidak bisa diperbaiki karena sesuai dengan Permenkeu 83/PMK. 02/2022 tentang tentang Standa Biaya Masuukan Tahun 2023 bahwa hanya sebesar Rp38.250.000 untuk kednaraan roda empat dan Rp.3.610.000 untuk Roda dua
4. Keterbatasan jumlah personil dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, apalagi beberapa tugas yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan, seperti patroli, pengamanan, pengamanan demo, penertiban, pengawalan dan lain-lain;
5. Kurangnya Pemahaman serta koordinasi antar PPNS Pada OPD lain dengan PPNS SatpolPP terhadap Perda apa saja yang ditegakkan sehingga menyebabkan seperti tidak ada koordinasi yang aktif.

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan dikemas dalam rapat internal

sehingga membudayakan budaya kerja yang baik

3. Koordinasi yang baik antar SatpolPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pemangku kepentingan baik pusat (ditjen Bangda, Ditjen Administrasi kewilayahan, KEMENPAN &RB sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sikap disiplin dan budaya kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
2. Mengajukan usulan sarana dan Prasarana terkait mobil damkar agar pelaksanaan pelayanan SPM optimal
3. Melakukan koordinasi yang aktif dengan vertikal (Kejaksaan, TNI, POLRI dalam rangka urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

LAMPIRAN

Lampiran 1. Scan Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	-4,50	-5,00	-5,50	-6,00
		Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	5,10	5,00	4,90	4,80
2.	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah (Satpol PP)	Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi (RB) SATPOLPP	Nilai reformasi Birokrasi	Tidak dilaksanakan lagi karena Perubahan Peremenpan			



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAMOWA'A HAREFA.AP
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG



YAMOWA'A HAREFA, AP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19750130 199402 1 003

Dipindai dengan CamScanner

**RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Perangkat Daerah: SATPOL PP

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target (volume)	Keadaan saat ini	Bukti Pendukung	Jadwal Tentatif Pelaksanaan					
						Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perlu adanya peningkatan dan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dalam setiap kegiatan pemantauan yang dilakukan	sudah dilaksanakan rapat internal untuk peningkatan perbaikan evaluasi terhadap dokumen perencanaan	2 dokumen	sudah diperbaiki sehingga sudah menggunakan kalimat yang menyatakan hasil bukan proses, mengubah formulai penghitungan indikator pada IKU	dokumen perencanaan yang sudah diperbaiki						
2	Hasil evaluasi rencana aksi seharusnya menunjukkan perbaikan disetiap periode	mengevaluasi rencana aksi dengan memperhatikan terhadap capaian tujuan, sasaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan setiap periode	1 dokumen	dalam setiap rapat bulanan sudah dibahas terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan, sasaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan setiap periode	notulen rapat						
3	hasil evaluasi program pemantauan sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	menindaklanjuti hasil evaluasi program dan rencana aksi	1 dokumen	hasil evaluasi program dan rencana aksi sudah ditindaklanjuti dalam rapat evaluasi kinerja bulanan	form tindaklanjuti hasil evaluasi program						
4	Hasil evaluasi rencana aksi hendaknya ditindaklanjuti sepenuhnya dalam bentuk langkah-langkah nyata	menyusun langkah - langkah nyata dalam menyusun rencana aksi unuk perbaikan dimasa yang akan datang	1 dokumen	sudah dilakukan pembahasan dengan bidang terkait beberapa rencana aksi yang harus dilakukan	notulen rapat						


Keterangan :

Rekomendasi : Diisi sesuai dengan LHP SAKIP PD TH 2023
 RATL : Diisi dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan atas rekomendasi yang diberikan
 Target : Diisi dengan volume pelaksanaan tindak lanjut
 Keadaan Saat ini : Diisi dengan keadaan saat ini sebagai data awal
 Bukti Pendukung : Diisi dengan dokumen pendukung yang dihasilkan atas pelaksanaan tindak lanjut

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


YANDRIY HAREFA, AP.
NIP. 19750130 199402 1 003

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAMOWA'A HAREFA, AP
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

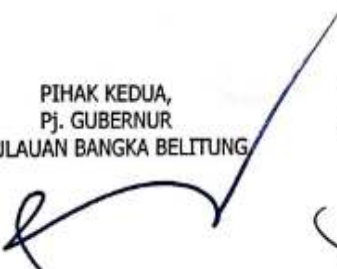
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pangkalpinang, November 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

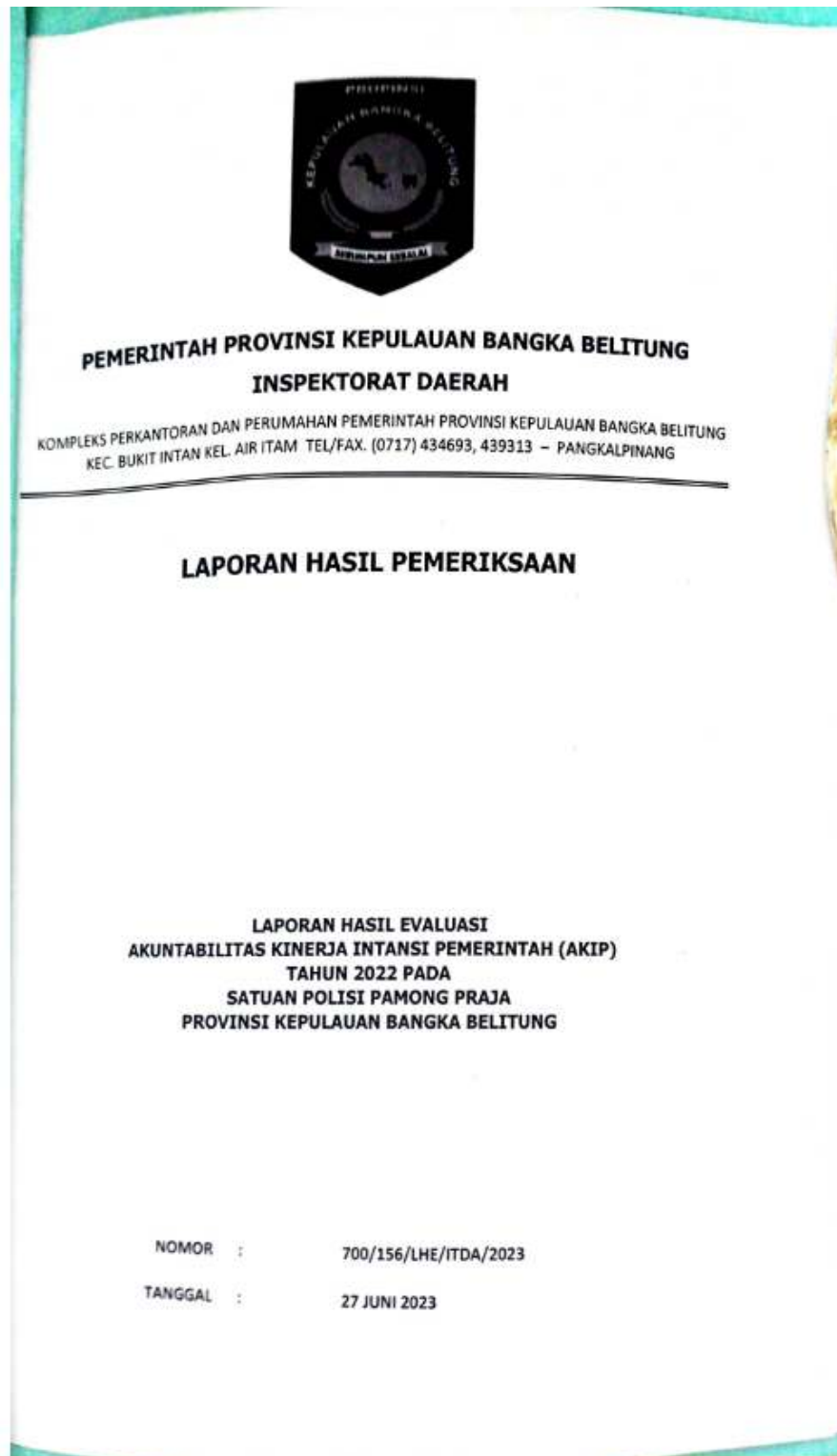


Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



YAMOWA'A HAREFA, AP.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19750130 199402 1 003



Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah: SATPOL PP

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target (volume)	Keadaan saat ini	Bukti Pendukung	Jadwal Tentatif Pelaksanaan					
						Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perlu adanya peningkatan dan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dalam setiap kegiatan pemantauan yang dilakukan	sudah dilaksanakan rapat internal untuk peningkatan perbaikan evaluasi terhadap dokumen perencanaan	2 dokumen	sudah diperbaiki sehingga sudah menggunakan kalimat yang menyatakan hasil bukan proses, mengubah formulai penghitungan indikator pada IKU	dokumen perencanaan yang sudah diperbaiki						
2	Hasil evaluasi rencana aksi seharusnya menunjukkan perbaikan disetiap periode	mengevaluasi rencana aksi dengan memperhatikan terhadap capaian tujuan, sasaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan setiap periode	1 dokumen	dalam setiap rapat bulanan sudah dibahas terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan, sasaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan setiap periode	notulen rapat						
3	hasil evaluasi program pemantauan sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	menindaklanjuti hasil evaluasi program dan rencana aksi	1 dokumen	hasil evaluasi program dan rencana aksi sudah ditindaklanjuti dalam rapat evaluasi kinerja bulanan	form tindaklanjuti hasil evaluasi program						
4	Hasil evaluasi rencana aksi hendaknya ditindaklanjuti sepenuhnya dalam bentuk langkah-langkah nyata	menyusun langkah - langkah nyata dalam menyusun rencana aksi unuk perbaikan dimasa yang akan datang	1 dokumen	sudah dilakukan pembahasan dengan bidang terkait beberapa rencana aksi yang harus dilakukan	notulen rapat						

Keterangan :

Rekomendasi

: Disisi sesuai dengan LHP SAKIP PD TH 2023

RATL

: Disisi dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan atas rekomendasi yang diberikan

Target

: Disisi dengan volume pelaksanaan tindak lanjut

Keadaan Saat ini

: Disisi dengan keadaan saat ini sebagai data awal

Bukti Pendukung

: Disisi dengan dokumen pendukung yang dihasilkan atas pelaksanaan tindak lanjut

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


YAMOWKA HAREFA, AP.
NIP. 19750130 199402 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Telp. (0717) 424104 Pangkalpinang 33418

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/001.2 /SATPOL PP/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, akan berimplikasi terhadap perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 188.4 / /SATPOL PP/2023
TANGGAL JANUARI 2023

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023-2026**

- PERANGKAT DAERAH TUGAS :** SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
MEMBANTU GUBERNUR MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITUGASKAN KEPADA PROVINSI
- FUNGSI**
1. PENYELENGGARAAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI
 2. PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI
 3. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 4. PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPOAN DINAS
 5. PENYELENGGARAAN FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI NYA

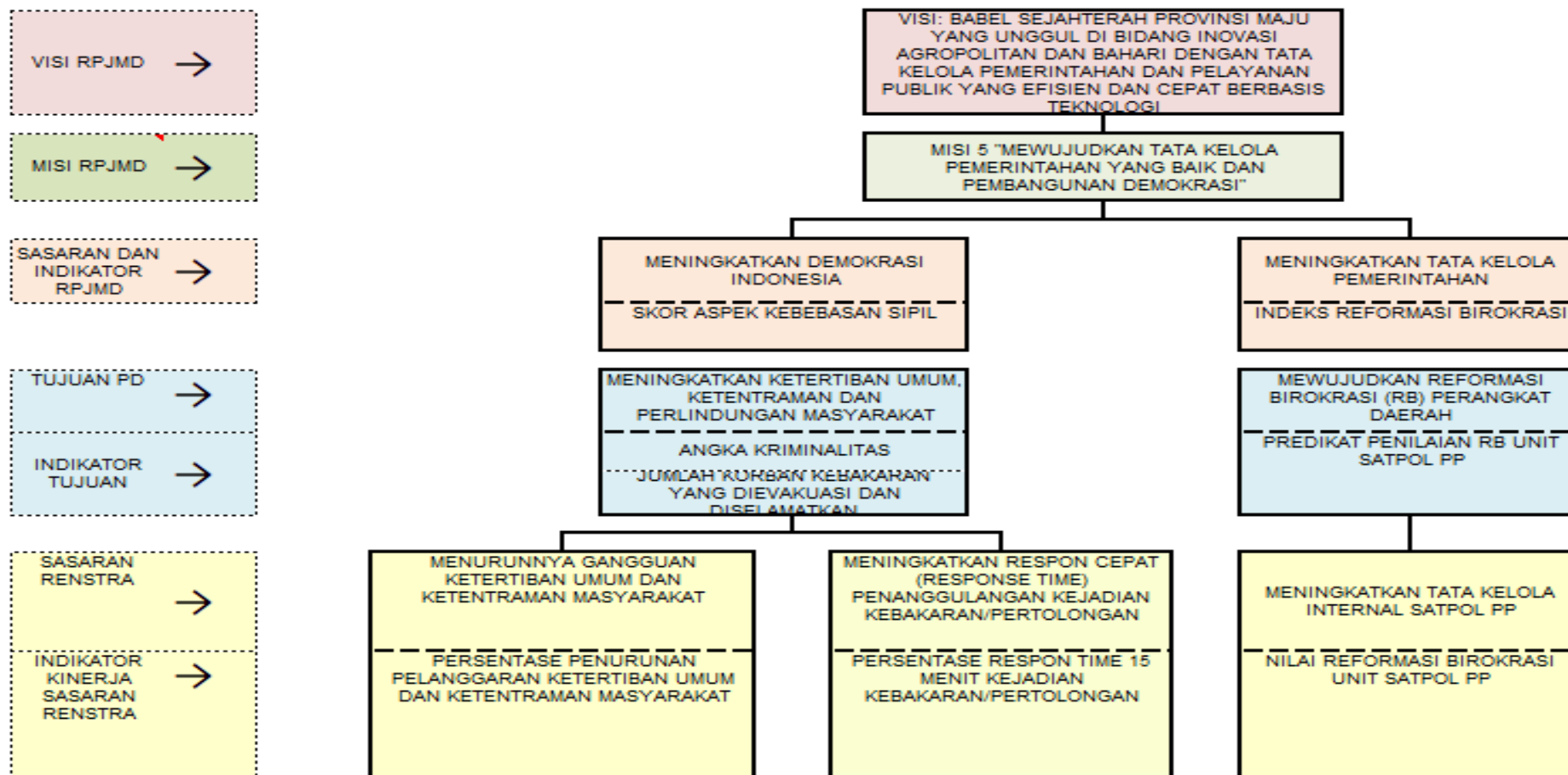
NO.	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/RUMUS
1.	Menurunnya gangguan ketrtiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketrtiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	$(n) - (n-1) / (n-1) \times 100\%$, * n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kep. Babel
2.	Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan	Persentase penurunan dampak dari kejadian pemadam penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan	Persentase penurunan dampak dari kejadian pemadam penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran	$(\text{Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran}) + (\text{Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran}) / 2 \times 100\%$
3.	Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) SatpolPP	Nilai reformasi birokrasi unit SATPOLPP	Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) SatpolPP	tidak dilaksanakan lagi karena terjadi perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ttd

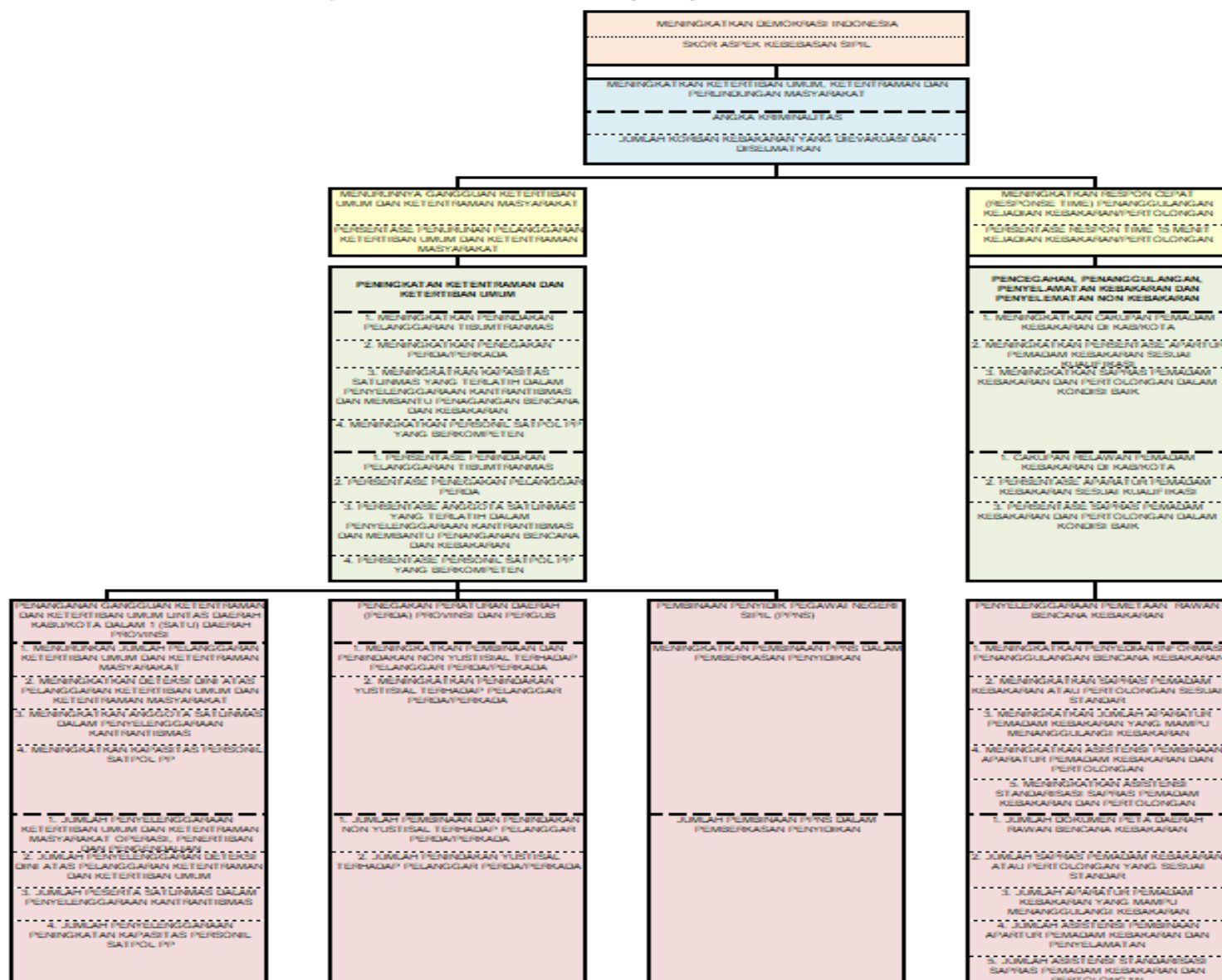
YAMOWA'A HAREFA
NIP. 19740130 199102 1 003

**KETERKAITAN VISI, MISI, DAN SASARAN RPJMD
DENGAN SASARAN RENSTRA SATPOL PP**



KETERIKATAN ANTARA SASARAN RPJMD (TRANSIBUM LINMAS DAN KEBAKARAN)
DENGAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA SATPOL PP (TUJUAN 1)

SASARAN RPJMD	→
INDIKATOR SASARAN RPJMD	→
TUJUAN PD	→
INDIKATOR TUJUAN	→
SASARAN RENSTRA	→
INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA	→
NAMA PROGRAM	→
SASARAN PROGRAM RENSTRA PD	→
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	→
KEGIATAN RENSTRA	→
SASARAN KEGIATAN RENSTRA	→
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	→



**KETERKAITAN ANTARA SASARAN RPJMD (SEKRETARIAT)
DENGAN SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENSTRA SATPOL PP (TUJUAN 2)**

SASARAN RPJMD	→
INDIKATOR SASARAN RPJMD	→

TUJUAN PD	→
INDIKATOR TUJUAN	→

SASARAN RENSTRA	→
INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA	→

NAMA PROGRAM	→
--------------	---

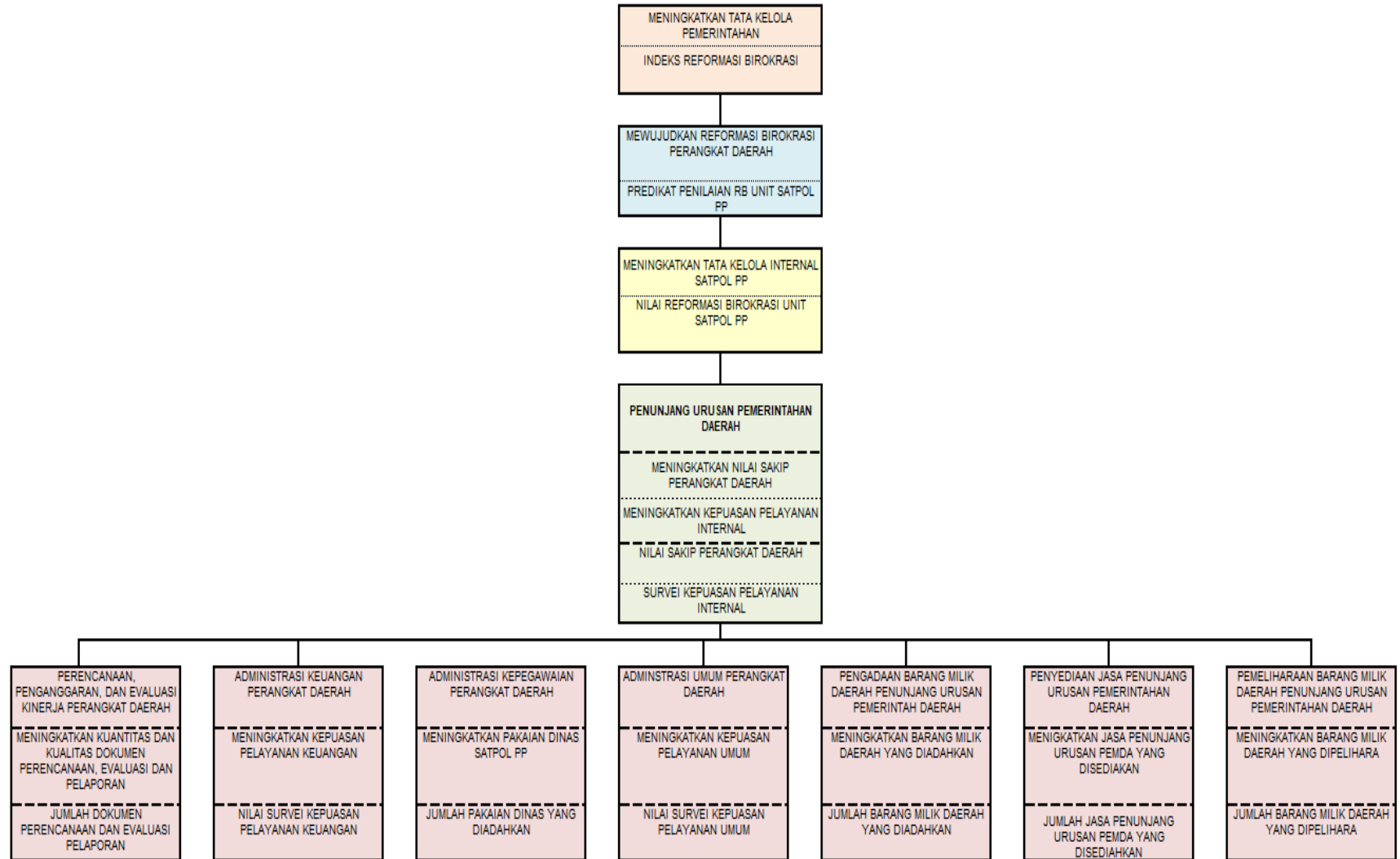
SASARAN PROGRAM RENSTRA PD	→
----------------------------	---

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	→
---------------------------	---

KEGIATAN RENSTRA	→
------------------	---

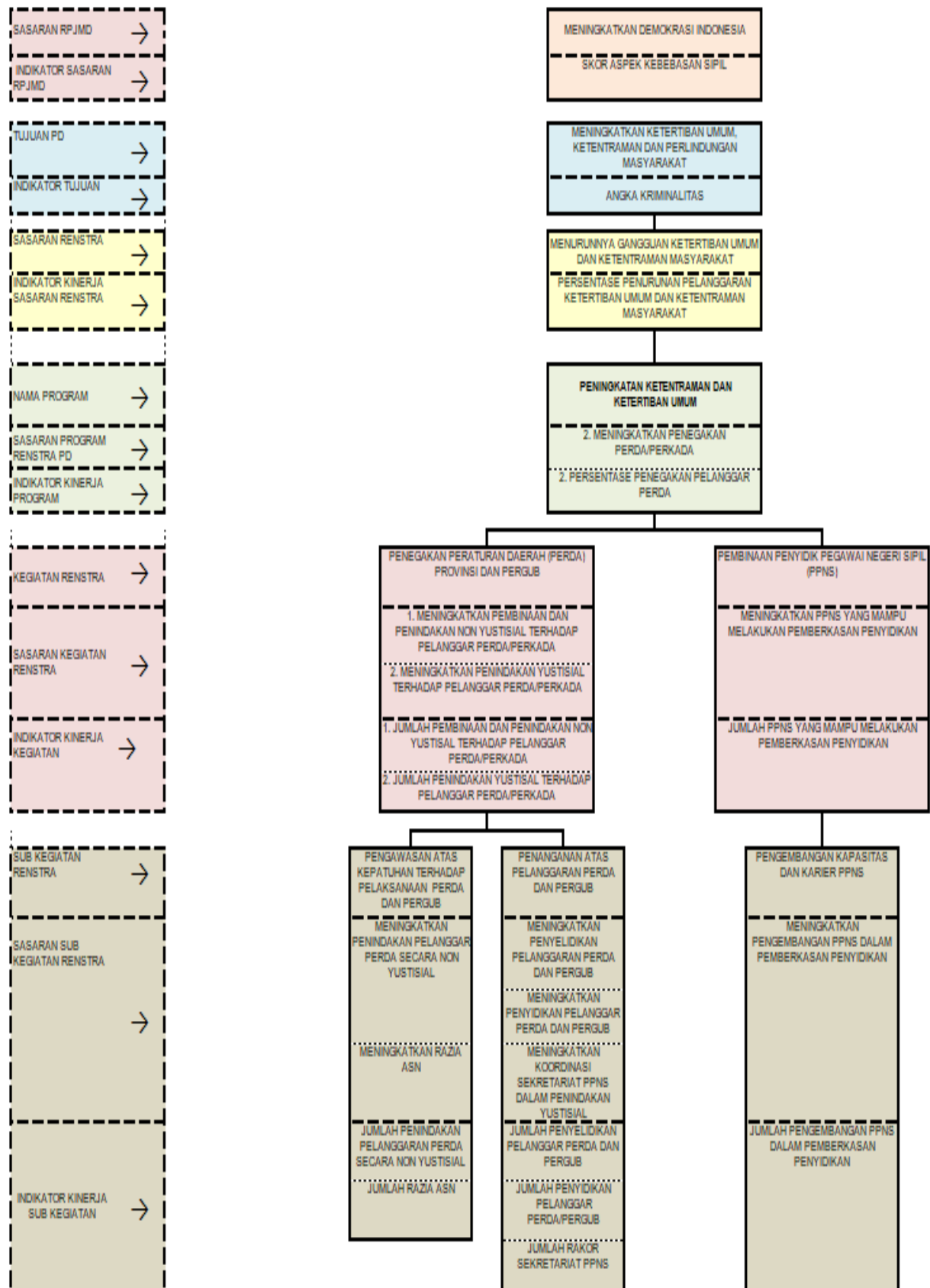
SASARAN KEGIATAN RENSTRA	→
--------------------------	---

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	→
----------------------------	---

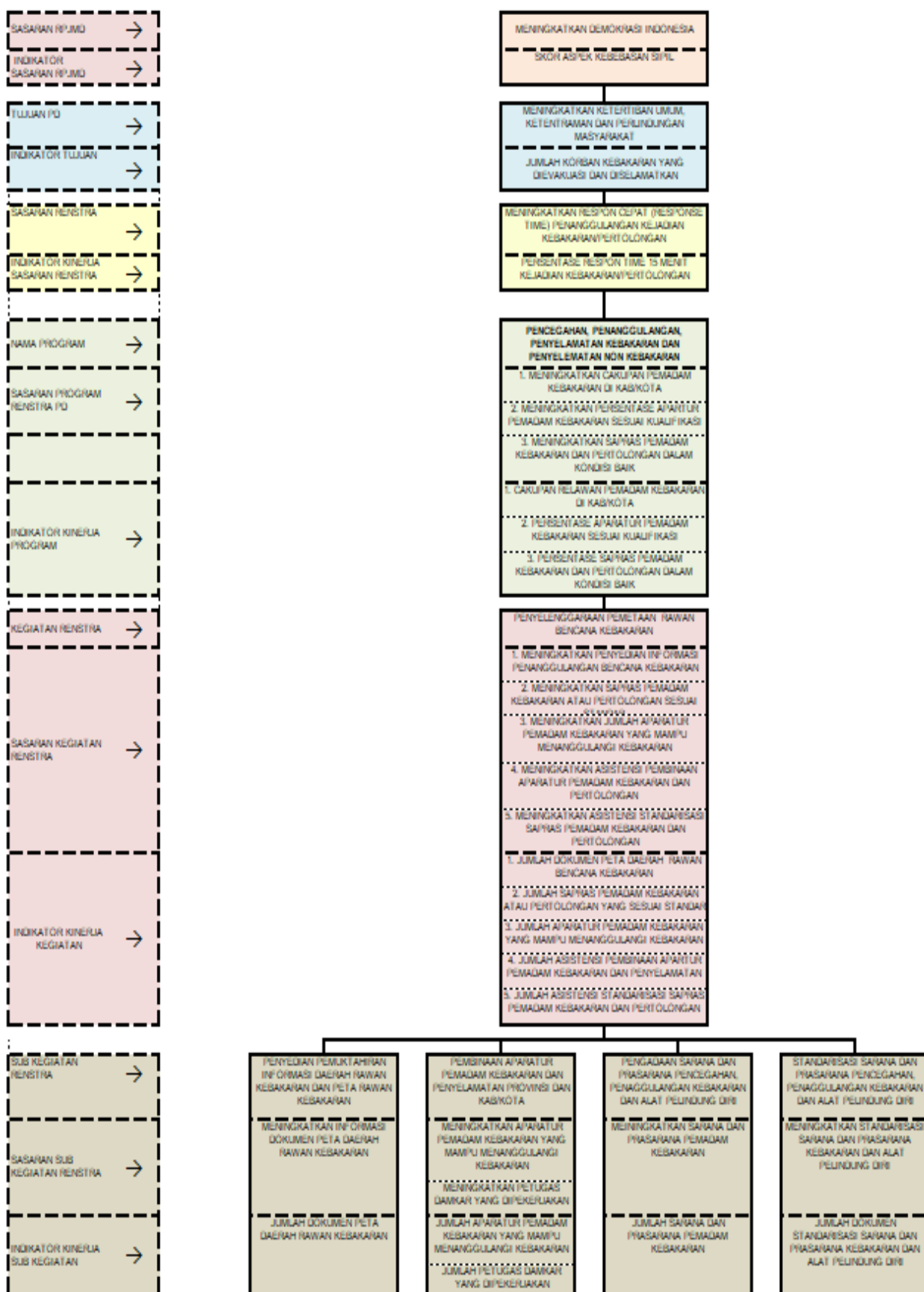


[illegible]

**KETERKAITAN ANTARA SASARAN RPJMD (TRANTIBUM LINMAS)
DENGAN SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENSTRA SATPOL PP (KEGIATAN PENEGAKAN PERDA DAN PEMBINAAN PPNS)**



KETERKAITAN ANTARA SA SARAN RPJMD (KEBAKARAN)
DENGAN SA SARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA SATPOL PP (KEGIATAN PEMETAAN KEBAKARAN)



GAMBAR PETA SUB PROSES SATPOL PP 01

SATPOL PP 01 MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATPOL PP.01.01 MENURUNKAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	SATPOL PP 01.02 MENINGKATKAN RESPON CEPAT (RESPON TIME) PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN/PERTOLON GAN
--	--

PANGKALPINANG, 27 AGUSTUS 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PPROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG


YAMOWA A HAREFA, AP.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19750130 199402 1 003

GAMBAR PETA SUB PROSES SATPOL PP 02

SATPOL PP 02 MENINGKATKAN PERINGKAT PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI SATPOL PP

**SATPOL PP 02.01
MENINGKATKAN
NILAI REFORMASI
BIROKRASI SATPOL PP**

PANGKALPINANG, 27 AGUSTUS 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PPROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**



**YAMOWA A HAREFA, AP.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19750130 199402 1 003**

PETA PROSES BISNIS SATPOL PP TABEL 1

PETA PROSES (KODE)	Sub Peta Proses		Jenis Proses
	Kode	Sub Peta Proses	Utama/Pendukung
MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP 01)	SATPOL PP 01.01	Menurunkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Utama
	SATPOL PP 01.02	Meningkatkan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan	Utama
MENINGKATKAN PERINGKAT PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI SATPOL PP (SATPOL PP 02)	SATPOL PP.02.01	Meningkatkan nilai reformasi birokrasi Satpol PP	Penunjang

PANGKALPINANG, 27 AGUSTUS 2021

KASAT POL PP
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG


 YAMOWA'A HAREFA, AP.
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19750130 199402 1 003

PETA PROSES BISNIS SATPOL PP TABEL 2

PETA PROSES (KODE)	SUB Peta Proses		Peta Urut Fungsional		
	Kode	SUB Peta Proses	Kode	CFM	Urutan
MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP 01)	SATPOL PP 01.01	Menurunkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	SATPOL PP 01.01.CFM.01	Penanganan gangguan ketertiban dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Bidang ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			SATPOL PP 01.01.CFM.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Bidang ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			SATPOL PP 01.01.CFM.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Bidang ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	SATPOL PP 01.02	Meningkatkan respon cepat (respon time) penanganan kejadian kebakaran/pertolongan	SATPOL PP 01.02.CFM.01	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Bidang ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
MENINGKATKAN PERINGKAT PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI SATPOL PP (SATPOL PP 02)	SATPOL PP 02.01	Meningkatkan nilai reformasi birokrasi Satpol PP	SATPOL PP 02.01 CFM 01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bidang ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			SATPOL PP 02.01 CFM 02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Bidang ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			SATPOL PP 02.01 CFM 03	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bidang ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			SATPOL PP 02.01 CFM 04	Administrasi umum perangkat daerah	Bidang ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			SATPOL PP 02.01 CFM 05	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Bidang ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			SATPOL PP 02.01 CFM 06	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bidang ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			SATPOL PP 02.01 CFM 07	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bidang ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

PANGKALPINANG, 27 AGUSTUS 2021

KASAT POL PP
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG


YANDIANA HAREFA, AP.
PEMUDA UTAMA MADYA
NIP. 19750130 199402 1 003

PETA PROSES BISNIS SATPOL PP TABEL 3

PETA LINTAS FUNGSI		
Kode	CFM	Unsur
SATPOL PP.01.01.CFM.01	Penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
SATPOL PP.01.01.CFM.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
SATPOL PP.01.01.CFM.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
SATPOL PP 01.02.CFM.01	Peryelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
SATPOL PP 02.01 CFM 01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
SATPOL PP 02.01 CFM 02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
SATPOL PP 02.01 CFM 03	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
SATPOL PP 02.01 CFM 04	Administrasi umum perangkat daerah	Bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
SATPOL PP 02.01 CFM 05	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
SATPOL PP 02.01 CFM 06	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
SATPOL PP 02.01 CFM 07	Peneliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

PANGKALPINANG, 27 AGUSTUS 2021

KASAT POL PP
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG


 YAMOWA HAREFA, AP.
 PEMERINTAH UTAMA MADYA
 NIP. 19750130 199402 1 003

Lampiran 8 STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

